



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA DUMAI  
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GRAFIK .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Isu-isu Strategis .....	5
1.5 Cascading Kinerja .....	5
1.6 Peta Proses Bisnis .....	7
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI .....	9
2.1 Rencana Strategis .....	9
2.2 Tujuan dan Sasaran .....	10
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program .....	12
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	14

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI .....	17
A.	Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai .....	17
3.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 .....	19
3.2	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	21
3.3	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra .....	24
3.4	Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional .....	25
3.5	Analisa penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi .....	26
3.6	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	28
3.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	30
3.8	Prestasi dan Penghargaan .....	32
B.	Realisasi Anggaran .....	32
BAB IV	PENUTUP .....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN :**

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 beserta lampiran perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024
7. Penghargaan

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....	xiii
Tabel 2 .....	xiv
Tabel 3 .....	xiv
Tabel 4 .....	xv
Tabel 5 .....	xvi
Tabel 6 .....	xvii
Tabel I.1 .....	8
Tabel I.2 .....	8
Tabel II.1 .....	12
Tabel II.2 .....	13
Tabel II.3 .....	14
Tabel II.4 .....	14
Tabel II.5 .....	15
Tabel II.6 .....	16
Tabel III.1 .....	18
Tabel III.2 .....	19
Tabel III.3 .....	20
Tabel III.4 .....	22
Tabel III.5 .....	24
Tabel III.6 .....	26
Tabel III.7 .....	28
Tabel III.8 .....	30
Tabel III.9 .....	31
Tabel III.10 .....	32
Tabel III.11 .....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 .....	4
Gambar I.2 .....	6
Gambar I.3 .....	7
Gambar II.1 .....	10

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LK ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LK) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, Januari 2025



Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kota Dumai,

EKO WARDYO, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660602 199003 1 005

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 51 Tahun 22 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai menjalankan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
2. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
3. pelaksanaan koordinasi pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

- serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
5. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
  6. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan MISI yang ke 4 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik" dan SASARAN yang ke 2 yang merupakan Tujuan Srategis Organisasi yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntable"

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai 2021-2026 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021-2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 5 (lima) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2024 antara lain:

- I. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :
    - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
  - c. Sub kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
  - d. Sub kegiatan Pembentukan Paskibraka.
- II. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
    - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
    - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
    - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- III. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
  - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- IV. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
    - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
    - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- V. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :
    - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai pada Tahun 2024 mengalami 2 (dua) kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai pada Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	90 %
		Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 %

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 44.484.704.673 (*Empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) untuk melaksanakan 6 (enam) Program Kerja antara lain :

Tabel 2  
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai pada Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.557.968.228	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.257.899.255	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 33.695.812.990	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 3.533.511.000	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 206.479.000	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.233.034.200	APBD
JUMLAH		Rp. 44.484.704.673	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 23 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3  
Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.700.384.252	Perubahan APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.547.690.855	Perubahan APBD

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 33.894.866.910	Perubahan APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 3.533.515.000	Perubahan APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 206.479.000	Perubahan APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.313.034.200	Perubahan APBD
JUMLAH		Rp. 45.195.970.217	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4  
Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024	Sangat Berhasil
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	90%	94%	104%	√
		Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100%	85%	85%	√

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori 1 (satu) yaitu **Sangat Berhasil**.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 45.195.966.217

(Empat puluh milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah) bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp 44.933.642.629 (Empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp 262.323.588 (Dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

1.	Belanja Operasi	:	Rp.	44.933.642.629
2.	Belanja Modal	:	Rp.	262.323.588
	Jumlah	:	Rp.	<b>45.195.966.217</b>

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2024

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Peningkatan kualitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai	100%					
Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	90%	95%	104%			
	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100%	85%	85%			
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	1.547.690.855	1.090.738.664	70,48%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	100%	100%	33.894.866.910	32.252.179.390	95,15%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%	3.533.511.000	2.402.763.150	68,00%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	100%	100%	206.479.000	175.102.300	84,80%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100%	100%	100%	1.313.034.200	932.628.254	71,03%

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2024**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi		Keterangan
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	104	79,61	1,18	Efisien	-
		Persentase Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	85	71,09	1,19	Efisien	-

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama Pertama yaitu* Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri tingkat efisiensinya adalah 1,18% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (94%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (79,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori ***EFISIEN***;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama Kedua yaitu* Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial tingkat efisiensinya adalah 1,19% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (85%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (71,09%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori ***EFISIEN***.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E/Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau (8.38.A/2021));
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
5. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 19 Seri D);

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (*responsibilitas*) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

## **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 51 Tahun 22 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

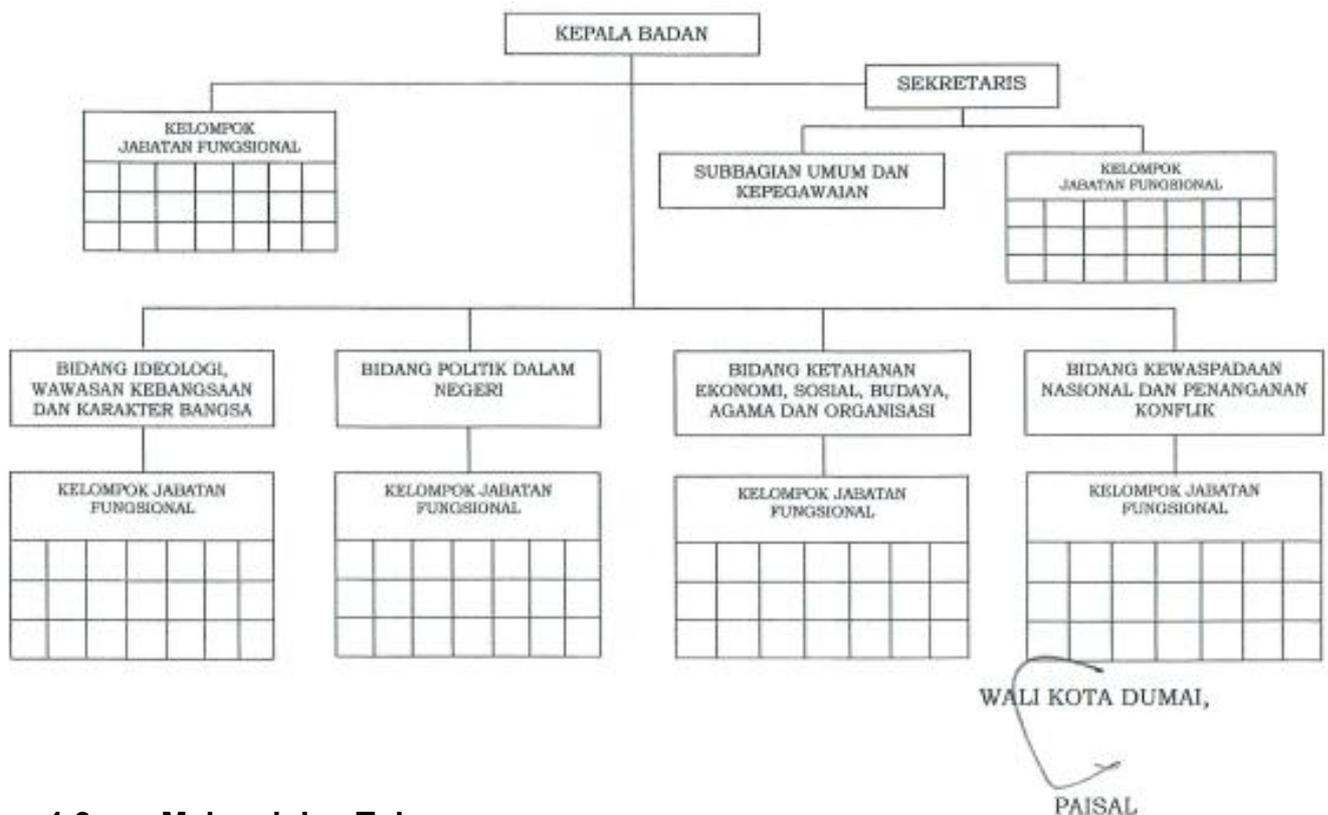
- a. perumusan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- c. pelaksanaan koordinasi pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ideologi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:

- Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:  
Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, terdiri dari:  
Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari:  
Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I.1  
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**1.3 Maksud dan Tujuan**

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2024, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;

- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindak lanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **1.4 Isu Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang perlu ditangani sebagai berikut:

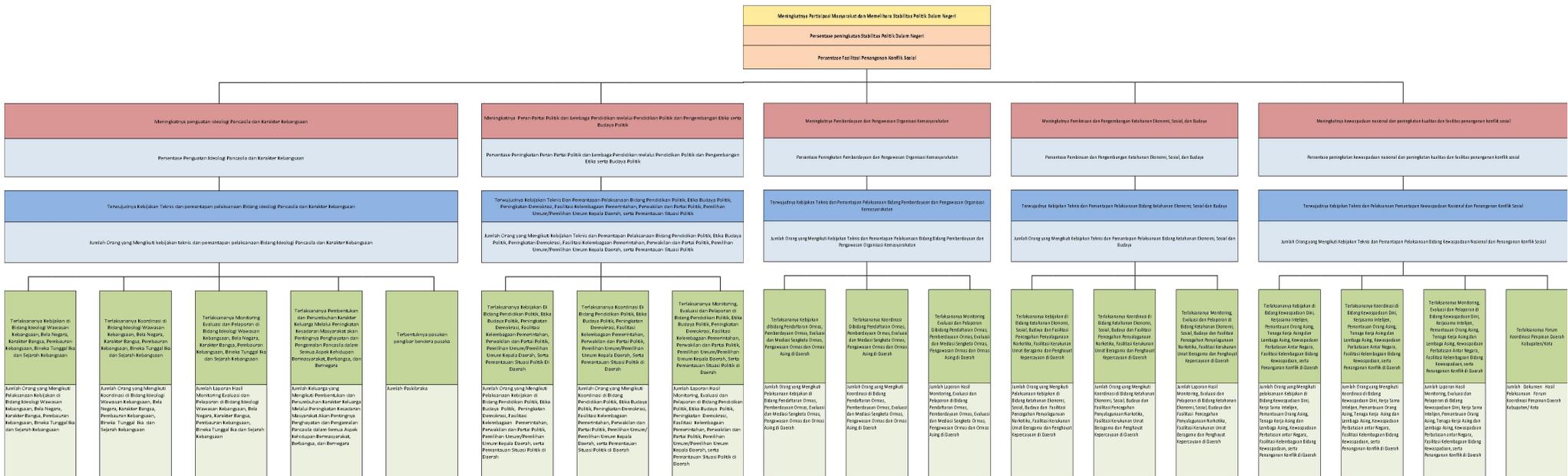
1. Rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi politik masyarakat;
2. Penanganan Konflik Sosial yang belum maksimal;
3. Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila di Masyarakat;
4. Belum seluruhnya Organisasi Masyarakat / LSM mendaftarkan serta melaporkan keberadaannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai.

#### **1.5 Cascading Kinerja**

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.2

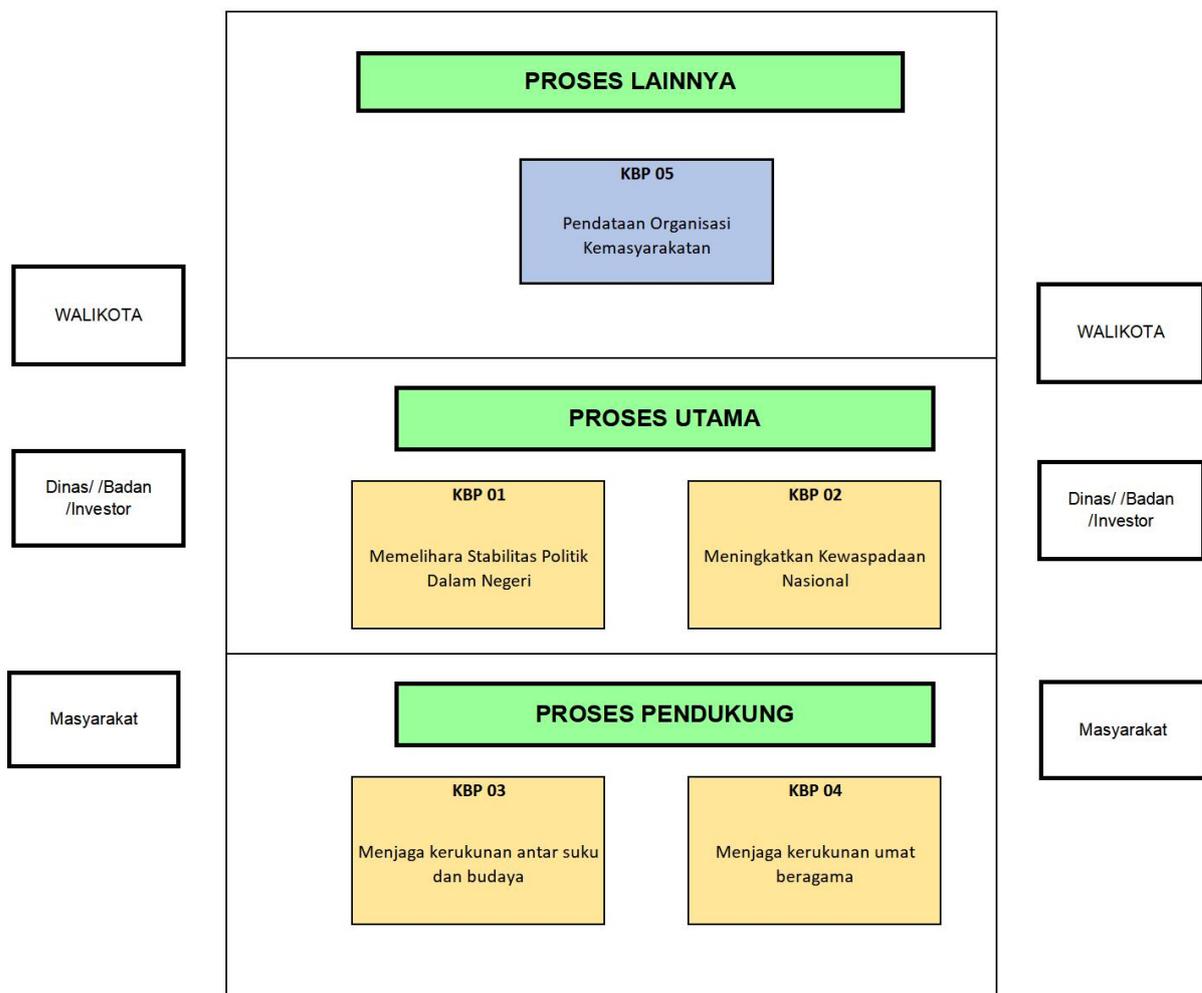
Cascading Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai



## 1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

Gambar I.3  
Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai



## 1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1304.1/INSP-S tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/ EVIDEN
1	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan cermat dalam menyusun LKjIP khususnya terkait dengan pengungkapan seluruh informasi dan perbandingan capaian kinerja	Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai akan lebih cermat dalam penyampaian narasi perbandingan capaian kinerja perangkat daerah, yakni perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu, perbandingan dengan target di level nasional ( <i>benchmark</i> ) serta penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja	1 Dokumen	15 Januari 2024	Kepala OPD	Telah selesai dilaksanakan	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2023 : <a href="https://drive.google.com/file/d/1RO-s8ZeBLsroMs2W3DtMOPIrFXy7wcdG/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1RO-s8ZeBLsroMs2W3DtMOPIrFXy7wcdG/view?usp=sharing</a>
2	Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi APIP atas hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai telah menindaklanjuti rekomendasi APIP atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	1 Dokumen	21 Agustus 2023	Kepala OPD	Telah selesai dilaksanakan	Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022 : <a href="https://drive.google.com/file/d/1utNn_TFdiz14isMzfUoPXSSK19JhcwwX/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1utNn_TFdiz14isMzfUoPXSSK19JhcwwX/view?usp=drive_link</a>

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

***“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu”***

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya

Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Wali kota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar II.1



## 2.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021-2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.1  
 Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran  
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2021-2026

IKU WALI KOTA			IKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Terlaksananya Reformasi Birokrasi dengan Indikator keberhasilan adalah Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri
					Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

### 2.3 Kebijakan, Strategi dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel II.2  
Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

<b>Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu</b>			
<b>Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.3  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

No.	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri
		Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

#### 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.4  
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	90 %
		Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 %

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2024 didukung

dengan anggaran sebesar Rp. 44.484.704.673 (*Empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) untuk melaksanakan 6 (enam) Program Kerja antara lain :

Tabel II.5  
Program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.557.968.228	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.257.899.255	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 33.695.812.990	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 3.533.511.000	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 206.479.000	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.233.034.200	APBD
<b>JUMLAH</b>		Rp. 44.484.704.673	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 23 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.6  
Perubahan Program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.700.384.252	Perubahan APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.547.690.855	Perubahan APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 33.894.866.910	Perubahan APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 3.533.515.000	Perubahan APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 206.479.000	Perubahan APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.313.034.200	Perubahan APBD
JUMLAH		Rp. 45.195.970.217	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2024**

**A. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai**

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres No 29 Tahun 2014).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

*Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017*

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

- a. Rumus :  $capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

- b. Rumus :  $capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel III.2  
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No.	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

### 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2024. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai pada tahun 2024 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel III.3 dan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III.3  
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2024

No.	SASARAN		2023		2024			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka mendukung Sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024	90%	100%	-	-	-	-
		Persentase Peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	90%	100%	90%	94%	104%	Sangat Berhasil
		Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	-	-	100%	85%	85%	Sangat Berhasil

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2024

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

**1. Indikator Persentase Peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri**

**Capaian kinerja** untuk indikator Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 90% realisasi sebesar 94% tercapai 104% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 90% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 sama dengan capaian di tahun 2023 yakni 100%.

Efisiensi Anggaran	8,32%
Nilai Anggaran	Rp. 35.920.783.504
Capaian 2024	104%
Target	90%
Realisasi	94%

## **2. Indikator Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

**Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 85% tercapai 85% atau bernilai kinerja tinggi.

Efisiensi Anggaran	28,97%
Nilai Anggaran	Rp. 932.628.254
Capaian 2024	85%
Target	100%
Realisasi	85%

### **3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel III.4  
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan  
beberapa tahun terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka mendukung Sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024	85%	90%	-	85%	90%	-	100%	100%	-
		Persentase Peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	90%	90%	90%	90%	90%	94%	100%	100%	104%
		Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	-	-	100%	-	-	85%	-	-	85%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 tahun kedepan. Indikator Pertama adalah **Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024** dengan target pada tahun 2022 adalah 85%, berasal dari perhitungan jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung sukses Pemilu/pilkada yang dilaksanakan tahun ini dibagi dengan jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung sukses Pemilu/pilkada. Realisasi pada tahun 2022 adalah 85% dengan capaian 100%;
  - b. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 90%. Realisasi pada tahun 2023 adalah 90% dengan capaian 100%;
  - c. Pada tahun 2024 Indikator Kinerja Utama yang pertama telah diganti dengan Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial berdasarkan Perubahan Kedua Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2021-2026.
  
2. a. Indikator Kinerja Utama yang kedua adalah **Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri** dengan target pada tahun 2022 adalah 90% berasal dari perhitungan jumlah kegiatan peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan tahun ini dibagi dengan jumlah kegiatan peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri. Realisasi pada tahun 2022 adalah 90% dengan capaian 100%;
  - b. Pada tahun 2023 target kinerja tetap 90%, Realisasi pada tahun 2023 adalah 95% dengan capaian 100%;
  - c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap 90% dan realisasinya adalah 94%, dengan capaian 104%.

<b>Efisiensi Anggaran</b>	<b>8,32%</b>
<b>Nilai Anggaran</b>	<b>Rp. 35.920.783.504</b>
<b>Capaian 2024</b>	<b>104%</b>
<b>Target</b>	<b>90%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>94%</b>



3. a. Indikator Kinerja Utama yang ketiga adalah **Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** dengan target pada tahun 2024 adalah 100%, berasal dari perhitungan jumlah Konflik yang terfasilitasi tahun ini dibagi dengan Jumlah Konflik tahun ini. Realisasi pada tahun 2024 adalah 85% dengan capaian 85%, Indikator Kinerja Utama ini merupakan Indikator baru pada tahun 2024 berdasarkan Perubahan Kedua Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2021-2026.

### 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel III.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

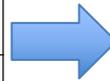
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	90%	94%	104%
		Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100%	85%	85%

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2021-2026, yaitu:

#### a. Indikator Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 94% dari target Renstra sebesar 90% dan terealisasi 94% pada tahun 2024.

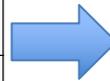
<b>Efisiensi Anggaran</b>	<b>8,32%</b>
<b>Nilai Anggaran</b>	<b>Rp. 35.920.783.504</b>
<b>Capaian 2024</b>	<b>104%</b>
<b>Target</b>	<b>90%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>94%</b>



### b. Indikator Persentase Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Fasilitas Penanganan Konflik Sosial tahun 2024 belum mencapai dari target akhir Renstra yaitu sebesar 85% dari target Renstra sebesar 100% dan terealisasi 85% pada tahun 2024.

<b>Efisiensi Anggaran</b>	<b>28,97%</b>
<b>Nilai Anggaran</b>	<b>Rp. 932.628.254</b>
<b>Capaian 2024</b>	<b>85%</b>
<b>Target</b>	<b>100%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>85%</b>



### 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional sebagaimana tabel III.6 berikut :

Tabel III.6  
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	94%	-	Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai
		Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	85%	-	

### 3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

#### 1. Indikator Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri

- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 90% realisasi sebesar 94% tercapai 104% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 90% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 4%.
- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
  - Bantuan Keuangan Partai Politik;
  - Belanja Hibah Pilkada dan Harkamtibnas;
  - Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:  
Keterbatasan dukungan anggaran pada organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur pemerintahan umum di daerah dalam rangka memelihara dan menjaga Stabilitas Politik Dalam Negeri.

- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Pemerintah Daerah kedepannya diharapkan menyediakan alokasi anggaran yang memadai pada organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur pemerintahan umum di daerah dalam rangka memelihara dan menjaga Stabilitas Politik Dalam Negeri.

## **2. Indikator Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

- a. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 85% tercapai 85% atau bernilai kinerja sangat tinggi.
- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial kurang mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) bersama masyarakat;
  - Rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara berkala.
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut:
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat dan personil perangkat daerah tentang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - Belum adanya sosialisasi secara berkala tentang kewaspadaan dini dan deteksi dini kepada masyarakat;
  - Kurangnya koordinasi Tim pemantauan kegiatan orang asing, Non Governmental Organizations dan Lembaga Asing.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut:
- Diklat bidang kewaspadaan dini;
  - Sosialisasi secara berkala tentang kewaspadaan dini dan deteksi dini kepada masyarakat;
  - Sosialisasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing.

### 3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.7

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
1.	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	Meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	%	1.547.690.855	1.090.738.664	70,48
		Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Capaian Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100	96	%	33.894.866.910	32.252.179.390	95,15
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	90	%	3.533.511.000	2.402.763.150	68,00
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100	90	%	206.479.000	175.102.300	84,80

No.	IKU	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
2.	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100	85	%	1.313.034.200	932.628.254	71,03

### 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.8  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	94%	79,61
		Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	85%	71,09

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama Pertama yaitu* Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri tingkat efisiensinya adalah 1,18% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (94%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (79,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama Kedua yaitu* Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial tingkat efisiensinya adalah 1,19% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (85%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (71,09%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

Tabel III.9

Data Dukung Capaian Anggaran dan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai  
Tahun 2024 untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Program	Capaian Anggaran
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,547,690,855	1,090,738,664	94.00%	100%	70.48%
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	33,894,866,910	32,252,179,390		96%	95.15%
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3,533,511,000	2,402,763,150		90%	68.00%
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	206,479,000	175,102,300		90%	84.80%
		Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,313,034,200	932,628,254	85%	85%	71.03%

### 3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.10  
Prestasi dan Penghargaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1.	Piagam Penghargaan	Kemitraan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 di Kota Dumai	Nasional	Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) RI Yudian Wahyudi
				

### B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III.11  
Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,700,384,252.00</b>	<b>4,153,740,542.00</b>	<b>88.37%</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	3,167,092,680.00	3,000,361,263.00	<b>94.74%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,167,092,680.00	3,000,361,263.00	<b>94.74%</b>
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	544,461,184.00	436,896,811.00	<b>80.24%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,947,200.00	9,846,000.00	<b>98.98%</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96,580,200.00	47,524,500.00	<b>49.21%</b>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49,320,000.00	20,190,000.00	<b>40.94%</b>
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34,958,000.00	22,859,000.00	<b>65.39%</b>
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,760,000.00	2,925,000.00	<b>50.78%</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347,895,784.00	333,552,311.00	<b>95.88%</b>
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	262,323,588.00	80,500,000.00	<b>30.69%</b>
Pengadaan Mebel	64,025,900.00	-	<b>0.00%</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	198,297,688.00	80,500,000.00	<b>40.60%</b>
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	558,576,800.00	501,918,297.00	<b>89.86%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,920,000.00	4,920,000.00	<b>100.00%</b>

<b>Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,000,000.00	8,250,000.00	<b>91.67%</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	544,656,800.00	488,748,297.00	<b>89.74%</b>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	167,930,000.00	134,064,171.00	<b>79.83%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105,120,000.00	88,979,437.00	<b>84.65%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,900,000.00	33,834,734.00	<b>82.73%</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,910,000.00	11,250,000.00	<b>51.35%</b>
<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	1,547,690,855.00	1,090,738,664.00	<b>70.48%</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	1,547,690,855.00	1,090,738,664.00	<b>70.48%</b>
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50,000,000.00	36,299,000.00	<b>72.60%</b>
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300,000,000.00	284,350,000.00	<b>94.78%</b>
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	49,868,900.00	- .00	<b>0.00%</b>
Pembentukan Paskibraka	1,147,821,955.00	770,089,664.00	<b>67.09%</b>

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	33,894,866,910.00	32,252,179,390.00	<b>95.15%</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	33,894,866,910.00	32,252,179,390.00	<b>95.15%</b>
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2,517,816,720.00	1,555,990,200.00	<b>61.80%</b>
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	41,920,000.00	- .00	<b>0.00%</b>
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	31,335,130,190.00	30,696,189,190.00	<b>97.96%</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	3,533,511,000.00	2,402,763,150.00	<b>68.00%</b>

<b>Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	3,533,511,000.00	2,402,763,150.00	<b>68.00%</b>
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3,400,000,000.00	2,315,000,000.00	<b>68.09%</b>
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40,000,000.00	25,700,000.00	<b>64.25%</b>
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	93,511,000.00	62,063,150.00	<b>66.37%</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	206,479,000.00	175,102,300.00	<b>84.80%</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	206,479,000.00	175,102,300.00	<b>84.80%</b>
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	179,759,000.00	163,222,300.00	<b>90.80%</b>
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	26,720,000.00	11,880,000.00	<b>44.46%</b>
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	1,313,034,200.00	932,628,254.00	<b>71.03%</b>

<b>Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	1,313,034,200.00	932,628,254.00	<b>71.03%</b>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	199,962,000.00	81,285,664.00	<b>40.65%</b>
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	184,872,000.00	150,824,500.00	<b>81.58%</b>
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	130,213,200.00	21,440,000.00	<b>16.47%</b>
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	797,987,000.00	679,078,090.00	<b>85.10%</b>

Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebesar Rp **45,195,966,217** (*Empat puluh milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp **41,007,152,300** (*Empat puluh satu milyar tujuh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah*) atau sebesar 90,73%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 yang mencapai 96,66%, jelas terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 5,93%. Namun penurunan ini bukan terjadi karena keterlambatan pengadaan atau pelaksanaan kegiatan, namun karena keterbatasan keuangan daerah, sehingga menyebabkan tunda bayar terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan penyerapan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Faktor utama yang menunjang berbagai hasil yang dicapai sepanjang tahun 2024 adalah adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan serta seluruh jajaran staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dalam upaya meningkatkan capaian kinerja instansi pemerintah. Salain itu walaupun secara kuantitas masih terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2024.

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun anggaran 2024 merupakan tahun ke 3 (dua) dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama, partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: Sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran 2024 yang melibatkan seluruh bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Duami Tahun 2024 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kota Dumai,



EKO WARDYO, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660602 199003 1 005

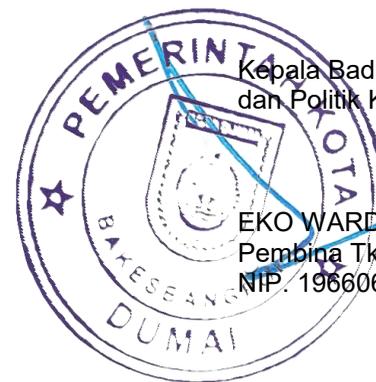
# LAMPIRAN

**MATRIK RENCANA STRATEGIS  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI  
TAHUN 2021 - 2026**

Visi : "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)"  
Misi : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik  
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN		
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	21		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Peningkatan kualitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai		100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri		-	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
																							Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		
																								Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
																									Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	21
											Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				100%	100%	100%	100%	100%			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai,

EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660602 199003 1 005

**RENCANA KERJA TAHUNAN  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	%	90
		Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	100

Dumai, Februari 2024

  
KEPALA,  
EKO WARDIYO, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660602 199003 1 005



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA DUMAI**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**  
Jabatan : **WALI KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

  
PIHAK KEDUA  
**H. PAISAL, SKM, MARS**

  
PIHAK PERTAMA  
**EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19660602 199003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	90
		Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.257.899.255	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 33.695.812.990	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 3.533.511.000	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 206.479.000	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.233.034.200	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.557.968.228	Pendukung





**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENDRY FAISAL, AP, M.Si**

Jabatan : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA



**EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19660602 199003 1 005

PIHAK PERTAMA



**HENDRY FAISAL, AP, M.Si**  
NIP. 19760529 199511 1 001

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntable	(3) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	(4) Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik	(5) 100%	(6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	(7) 4.557.968.228
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>						4.557.968.228

Dumai, Februari 2024

Pihak Pertama  
**SEKRETARIS**

  
**HENDRY FAISAL, AP, M.Si**  
NIP. 19760529 199511 1 001



  
**EKO WARDoyo, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19660602 199003 1 005



## PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEDDY, S.Pd, M.Pd**

Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024



**EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19660602 199003 1 005

PIHAK PERTAMA

**DEDDY, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19700321 199702 1 001

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntable	(3) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	(4) Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	(5) 100%	(6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	(7) 1.233.034.000
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>						<b>1.233.034.000</b>

Dumai, Februari 2024

Pihak Kedua  
**KEPALA**



**EKO WARDoyo, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19660602 199003 1 005

Pihak Pertama  
**Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional  
dan Penanganan Konflik**

**DEDDY, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19700321 199702 1 001



## PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KURNIAWAN. M, S.Kom, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

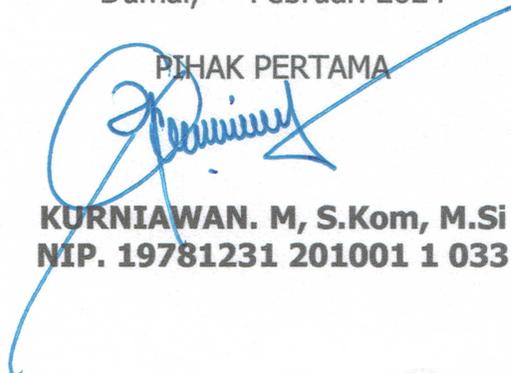
Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

  
PEMERINTAH KOTA  
PIHAK KEDUA  
BAKESBANGPOL  
**EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19660602 199003 1 005

  
PIHAK PERTAMA  
**KURNIAWAN. M, S.Kom, M.Si**  
NIP. 19781231 201001 1 033

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntable	(3) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	(4) Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(5) 100%	(6) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(7) 1.257.899.255
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>						1.257.899.255

Pihak Kedua  
**KEPALA**



**EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19660602-199003 1 005

Dumai, Februari 2024

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa**

**KURNIAWAN. M, S.Kom, M.Si**  
NIP. 19781231 201001 1 033



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAMSUL BAHRI, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA



**EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19660602 199003 1 005



PIHAK PERTAMA



**SYAMSUL BAHRI, S.Sos**  
NIP. 19670810 199309 1 001

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	(3) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	(4) Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	(5) 100%	(6) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	(7) 3.533.511.000
			Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	206.479.000
	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>					<b>3.739.990.000</b>

Dumai, Februari 2024

Pihak Kedua

**KEPALA**



**EKO WARDoyo, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19660602 199003 1 005

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,  
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan**

**SYAMSUL BAHRI, S.Sos**  
NIP. 19670810 199309 1 001



## PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TAMMY ARTHADINATA, S.STP**

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

  
PIHAK KEDUA  
**EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19660602 199003 1 005

PIHAK PERTAMA  
  
**TAMMY ARTHADINATA, S.STP**  
NIP. 19830815 200212 1 002

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntable	(3) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	(4) Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	(5) 100%	(6) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	(7) 33.695.812.990
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>						33.695.812.990

Dumai, Februari 2024

Pihak Pertama  
**Kepala Bidang Politik Dalam Negeri**



**EKO WARDoyo, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19660602 199003 1 005

**TAMMY ARTHADINATA, S.STP**  
NIP. 19830815 200212 1 002



## PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAJRI ANTUSIAS, S.Sos

Jabatan : Perencana

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : HENDRY FAISAL, AP, M.Si

Jabatan : Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Dumai

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA

  
HENDRY FAISAL, AP, M.Si  
NIP. 19760529 199511 1 001

PIHAK PERTAMA

  
FAJRI ANTUSIAS, S.Sos  
NIP. 19791003 200112 1 002

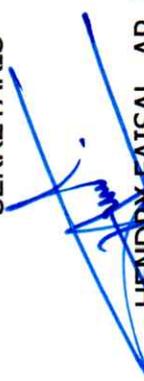
**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntable	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dumai, Februari 2024

Pihak Kedua  
SEKRETARIS

  
HENDRY FAISAL, AP, M.Si  
NIP. 19760529 199511 1 001

Pihak Pertama  
Perencana

  
FAJRI ANTUSIAS, S.Sos  
NIP. 19791003 200112 1 002



## **PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUSDAWATI, S.Sos

Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : HENDRY FAISAL, AP, M.Si

Jabatan : Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Dumai

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA

  
HENDRY FAISAL, AP, M.Si  
NIP. 19760529 199511 1 001

PIHAK PERTAMA

  
JUSDAWATI, S.Sos  
NIP. 19680317 199203 2 004

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntable	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 dokumen 2 dokumen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.500.000 485.616.400
			Jumlah Unit Pengadaan Barang Miliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 unit	Pengadaan Barang Miliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	174.339.216
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 laporan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.576.800
			Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Miliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43 unit	Pemeliharaan Barang Miliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.930.000
			<b>JUMLAH ANGGARAN</b>			<b>1.408.962.416</b>

Dumai, Februari 2024

Pihak Kedua  
Sekretaris  
Kasubag. Umum dan Kepegawaian



JUSDAWATI, S.Sos  
NIP. 19680317 199203 2 004

Pihak Pertama  
SEKRETARIS



HENDRY FAISAL, AP, M.Si  
NIP. 19760529 199511 1 001



## **PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MELCY ANOMOSA, S.E

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : HENDRY FAISAL, AP, M.Si

Jabatan : Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Dumai

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA

  
HENDRY FAISAL, AP, M.Si  
NIP. 19760529 199511 1 001

PIHAK PERTAMA

  
MELCY ANOMOSA, S.E  
NIP. 19840222 201001 2 032

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntable	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Dokumen / Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.149.005.812
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>						3.149.005.812

Dumai, Februari 2024

Pihak Kedua  
SEKRETARIS

  
~~HENDRY FAISAL, AP, M.Si~~  
NIP. 19760529 199511 1 001

Pihak Pertama  
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

  
MELCY ANOMOSA, S.E  
NIP. 19840222 201001 2 032



## **PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI BUNIAN, S.H

Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : SYAMSUL BAHRI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA

SYAMSUL BAHRI, S.Sos  
NIP. 19670810 199309 1 001

PIHAK PERTAMA

SRI BUNIAN, S.H  
NIP. 19800424 201001 2 026

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	(2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntable	(3) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	(4) Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	(5) 20 orang	(6) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	(7) 3.400.000.000
Pihak Kedua			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 orang	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40.000.000
Pihak Pertama			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 laporan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	93.511.000
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>						
						3.533.511.000

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,  
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan



SYAMSUL BAHRI, S.Sos  
NIP. 19670810 199309 1 001

Dumai,      Februari 2024  
Pihak Pertama  
Analisis Kebijakan



SRI BUNIAN, S.H  
NIP. 19800424 201001 2 026



## **PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDRA IRAWAN, S.H

Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : TAMMY ARTHADINATA, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA

  
TAMMY ARTHADINATA, S.STP  
NIP. 19830815 200212 1 002

PIHAK PERTAMA

  
HENDRA IRAWAN, S.H  
NIP. 19740701 200112 1 002

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1) 1.	(2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	(3) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	(4) Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah  Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	(5) 45 orang  23 orang	(6) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah  Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	(7) 2.368.762.800  41.920.000
						31.285.130.190
						33.695.812.990
			JUMLAH ANGGARAN			

Dumai, Februari 2024  
Pihak Pertama  
Analisis Kebijakan

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

TAMMY ARTHADINATA, S.STP  
NIP. 19830815 200212 1 002

HENDRA IRAWAN, S.H  
NIP. 19740701 200112 1 002



## **PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JACK ALLAN RUS, S.S

Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : DEDDY, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA

DEDDY, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19700321 199702 1 001

PIHAK PERTAMA

JACK ALLAN RUS, S.S  
NIP. 19771203 200604 1 003

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntable	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	48 orang	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	199.962.000
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	3 dokumen	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	797.987.000
			<b>JUMLAH ANGGARAN</b>			997.949.000

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional  
dan Penanganan Konflik

  
DEDDY, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19700321 199702 1 001

Pihak Pertama  
Analisis Kebijakan

  
JACK ALLAMRUS, S.S  
NIP. 19771203 200604 1 003

Dumai, Februari 2024



## **PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISSINAWARI, S.Sos

Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : KURNIAWAN. M, S.Kom, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA

KURNIAWAN. M, S.Kom, M.Si  
NIP. 19781231 201001 1 033

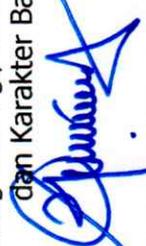
PIHAK PERTAMA

ISSINAWARI, S.Sos  
NIP. 19760605 200212 1 005

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 laporan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300.000.000
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	120 keluarga	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	49.999.900
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>						349.999.900

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa

  
KURNIAWAN. M, S.Kom, M.Si  
NIP. 19781231 201001 1 033

Dumai, Februari 2024

Pihak Pertama  
Analisis Kebijakan

  
ISSINAWARI, S.Sos  
NIP. 19760605 200212 1 005



## **PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR AL'AFA, S.Kom

Jabatan : Analis Data dan Informasi

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : MELCY ANOMOSA, S.E

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA

MELCY ANOMOSA, S.E  
NIP. 19840222 201001 2 032

PIHAK PERTAMA

NUR AL'AFA, S.Kom  
NIP. 19921014 201902 2 006

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntable	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	20 orang 1 laporan 1 laporan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.149.005.812 - -
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>						3.149.005.812

Dumai, Februari 2024

Pihak Kedua  
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

Pihak Pertama  
Analisis Data dan Informasi

MELCY ANOMOSA, S.E  
NIP. 19840222 201001 2 032

NUR AL'AFAN, S.Kom  
NIP. 19921014 201902 2 006



## **PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAVID MARUNI

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : JUSDAWATI, S.Sos

Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA

JUSDAWATI, S.Sos  
NIP. 19680317 199203 2 004

PIHAK PERTAMA

DAVID MARUNI  
NIP. 19750806 200604 1 006

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntable	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	Pengadaan Mebel	74.921.100
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.418.116
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>						174.339.216

Dumai, Februari 2024

Pihak Kedua  
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

  
JUSDAWATI, S.Sos  
NIP. 19680317 199203 2 004

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Umum

  
DAVID MARUNI  
NIP. 19750806 200604 1 006



## **PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARHALIM

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : JUSDAWATI, S.Sos

Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

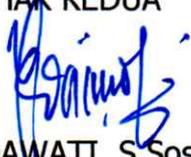
Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA

  
JUSDAWATI, S.Sos  
NIP. 19680317 199203 2 004

PIHAK PERTAMA

  
MARHALIM  
NIP. 19821030 201407 1 002

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntable	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.120.000
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.900.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45 unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.910.000
			<b>JUMLAH ANGGARAN</b>			<b>170.930.000</b>

Dumai, Februari 2024

Pihak Kedua  
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Umum



JUSDAWATI, S.Sos  
NIP. 19680317 199203 2 004



MARHALIM  
NIP. 19821030 201407 1 002



## **PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAPUTRA NOVA

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : ISSINAWARI, S.Sos

Jabatan : Analis Kebijakan

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2024

PIHAK KEDUA

ISSINAWARI, S.Sos  
NIP. 19760605 200212 1 005

PIHAK PERTAMA

SAPUTRA NOVA  
NIP. 19861110 201001 1 011

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntable	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16 orang	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.000.000
			Jumlah Paskibraka	84 orang	Pembentukan Paskibraka	857.899.355
			<b>JUMLAH ANGGARAN</b>			907.899.355

Pihak Kedua  
Analisis Kebijakan



ISSINAWARI, S.Sos  
NIP. 19760605 200212 1 005

Dumai, Februari 2024

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Umum



SAPUTRA NOVA  
NIP. 19861110 201001 1 011



# **PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA DUMAI  
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Paisal, SKM, MARS

Jabatan : Wali Kota Dumai

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua,  
H. Paisal, SKM, MARS

Dumai, 13 September 2024

  
Pihak Pertama,  
Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	90%
		Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.547.690.855	
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 33.894.866.910	
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 3.533.511.000	
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 206.479.000	
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.313.034.200	
Jumlah	Rp. 40.495.581.965	



Wali Kota Dumai,

H. Paisal, SKM, MARS

Dumai, 23 September 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai,

Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si





## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendry Faisal, AP, M.Si

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,



Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660602 199003 1 005

Pihak Pertama,

Hendry Faisal, AP, M.Si  
NIP. 19760529 199511 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.700.384.252	
Jumlah	Rp. 4.700.384.252	

Dumai, September 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kota Dumai,



Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660602 199003 1 005

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kota Dumai,

Signature of Hendry Faisal, AP, M.Si.

Hendry Faisal, AP, M.Si  
NIP. 19760529 199511 1 001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Bahri, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660602 199003 1 005

Syamsul Bahri, S.Sos  
NIP. 19670810 199309 1 001



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%
		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 3.533.511.000	
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 206.479.000	
Jumlah	Rp. 3.739.990.000	

Dumai, September 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai,



Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660602 199003 1 005

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan,

Syamsul Bahri, S.Sos  
NIP. 19670810 199309 1 001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deddy, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660602 199003 1 005

Deddy, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19700321 199702 1 001



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.313.034.200	
Jumlah	Rp. 1.313.034.200	

Dumai, September 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kota Dumai,

  
Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660602 199003 1 005

Kepala Bidang Kewaspadaan  
Nasional dan Penanganan Konflik,

  
Deddy, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19700321 199702 1 001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan. M, S.Kom, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

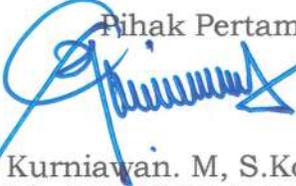
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,  
  
Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660602 199003 1 005

Pihak Pertama,  
  
Kurniawan. M, S.Kom, M.Si  
NIP. 19781231 201001 1 033

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.547.690.855	
Jumlah	Rp. 1.547.690.855	

Dumai, September 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kota Dumai,



Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660602 199003 1 005

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan  
Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Kurniawan. M, S.Kom, M.Si  
NIP. 19781231 201001 1 033



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tammy Arthadinata, S.STP  
Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri  
Selanjutnya disebut pihak pertama

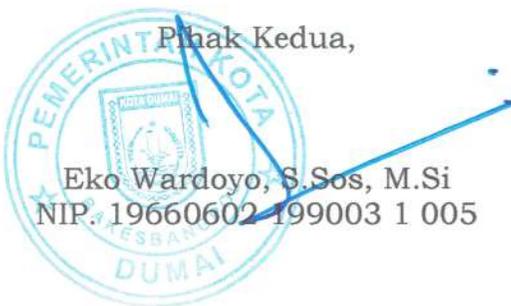
Nama : Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,



Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660602 199003 1 005

Pihak Pertama,

Tammy Arthadinata, S.STP  
NIP. 19830815 200212 1 002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase peningkatan stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 33.894.866.910	
Jumlah	Rp. 33.894.866.910	

Dumai, September 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai,

  
Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660602 199003 1 005

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri,

  
Tammy Arthadinata, S.STP  
NIP. 19830815 200212 1 002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jusdawati, S.Sos

Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hendry Faisal, AP, M.Si

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,



Hendry Faisal, AP, M.Si  
NIP. 19760529 199511 1 001

Pihak Pertama,



Jusdawati, S.Sos  
NIP. 19680317 199203 2 004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

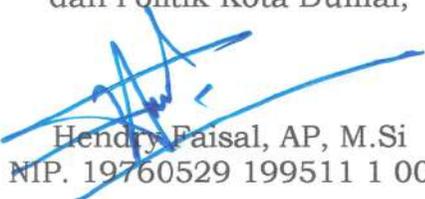
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 dokumen
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 unit
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 laporan
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43 unit

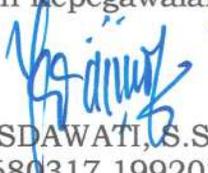
Kegiatan/Subkegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	544.461.184	
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	262.323.588	
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	558.576.800	
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	167.930.000	
Jumlah	Rp.	1.533.291.572	

Dumai, September 2024

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa  
 dan Politik Kota Dumai,

  
 Hendry Faisal, AP, M.Si  
 NIP. 19760529 199511 1 001

Kasubbag. Umum  
 dan Kepegawaian,

  
 JUSDAWATI, S.Sos  
 NIP. 19680317 199203 2 004



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajri Antusias, S.Sos

Jabatan : Perencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hendry Faisal, AP, M.Si

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

  
Hendry Faisal, AP, M.Si  
NIP. 19760529 199511 1 001

Pihak Pertama,

  
Fajri Antusias, S.Sos  
NIP. 19791003 200112 1 002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan

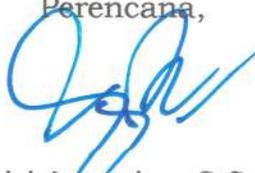
Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. -	
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. -	
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. -	
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. -	
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. -	
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. -	
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. -	

Dumai, September 2024

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa  
 dan Politik Kota Dumai,

  
 Henry Faisal, AP, M.Si  
 NIP. 19760529 199511 1 001

Perencana,

  
 Fajri Antusias, S.Sos  
 NIP. 19791003 200112 1 002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melcy Anomosa, S.E

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hendry Faisal, AP, M.Si

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

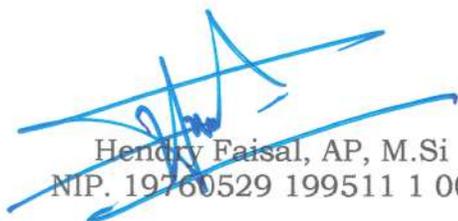
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

  
Hendry Faisal, AP, M.Si  
NIP. 19760529 199511 1 001

Pihak Pertama,

  
Melcy Anomosa, S.E  
NIP. 19840222 201001 2 032

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Dokumen / Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen

Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.167.092.680	
Jumlah	Rp. 3.167.092.680	

Dumai, September 2024

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kota Dumai,

  
Hendry Faisal, AP, M.Si  
NIP. 19760529 199511 1 001

Analisis Keuangan Pusat  
dan Daerah,

  
Melcy Anomosa, S.E  
NIP. 19840222 201001 2 032



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jack Allan Rus, S.S

Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Deddy, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Deddy, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19700321 199702 1 001

Pihak Pertama,

Jack Allan Rus, S.S  
NIP. 19771203 200604 1 003

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	48 orang
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen

Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 199.962.000	
2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 797.987.000	
Jumlah	Rp. 997.949.000	

Dumai, September 2024

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,



Deddy, S.Pd, M.Pd  
 NIP. 19700321 199702 1 001

Analisis Kebijakan,



Jack Allan Rus, S.S  
 NIP. 19771203 200604 1 003



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Bunian, S.H  
Jabatan : Analis Kebijakan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syamsul Bahri, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Syamsul Bahri, S.Sos  
NIP. 19670810 199309 1 001

Pihak Pertama,

Sri Bunian, S.H  
NIP. 19800424 201001 2 026

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase peningkatan stabilitas politik dalam negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 orang
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 orang
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 laporan

Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 3.400.000.000	
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 40.000.000	
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 93.511.000	
Jumlah	Rp. 3.533.511.000	

Dumai, September 2024

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat,



Syamsul Bahri, S.Sos  
 NIP. 19670810 199309 1 001

Analisis Kebijakan,



Sri Bunian, S.H  
 NIP. 19800424 201001 2 026



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Irawan, S.H

Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurniawan. M, S.Kom, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Kurniawan. M, S.Kom, M.Si  
NIP. 19781231 201001 1 033

Pihak Pertama,

Hendra Irawan, S.H  
NIP. 19740701 200112 1 002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

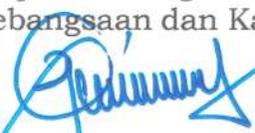
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16 orang
		Jumlah Paskibraka	35 orang

Kegiatan/Subkegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.	50.000.000	
2. Pembentukan Paskibraka	Rp.	1.147.821.955	
Jumlah	Rp.	1.197.821.955	

Dumai, September 2024

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,

  
Kurniawan. M, S.Kom, M.Si  
NIP. 19781231 201001 1 033

Analisis Kebijakan,

  
Hendra Irawan, S.H  
NIP. 19740701 200112 1 002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Issinawari, S.Sos

Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurniawan. M, S.Kom, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

  
Kurniawan. M, S.Kom, M.Si  
NIP. 19781231 201001 1 033

Pihak Pertama,

  
Issinawari, S.Sos  
NIP. 19760605 200212 1 005

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

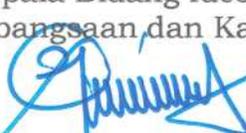
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 laporan
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	29 keluarga

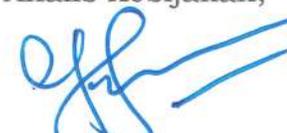
Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 300.000.000	
2. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rp. 49.868.900	
Jumlah	Rp. 349.868.900	

Dumai, September 2024

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,

  
 Kurniawan. M, S.Kom, M.Si  
 NIP. 19781231 201001 1 033

Analisis Kebijakan,

  
 Issinawari, S.Sos  
 NIP. 19760605 200212 1 005



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Al'afa, S.Kom  
Jabatan : Analis Data dan Informasi  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Melcy Anomosa, S.E  
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Melcy Anomosa, S.E  
NIP. 19840222 201001 2 032

Pihak Pertama,

Nur Al'afa, S.Kom  
NIP. 19921014 201902 2 00

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	
Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran		1 laporan	

Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.167.092.680	
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. -	
3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. -	
Jumlah	Rp. 3.167.092.680	

Dumai, September 2024

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah,



Melcy Anomosa, S.E  
NIP. 19840222 201001 2 032

Analisis Data dan Informasi,



Nur Al'afa, S.Kom  
NIP. 19921014 201902 2 00



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Maruni  
Jabatan : Pengadministrasi Umum  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jusdawati, S.Sos  
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Jusdawati, S.Sos  
NIP. 19680317 199203 2 004

Pihak Pertama,

David Maruni  
NIP. 19750806 200604 1 006

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 unit
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit

Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengadaan Mebel	Rp. 64.025.900	
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 198.297.688	
Jumlah	Rp. 262.323.588	

Dumai, September 2024

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian,

Pengadministrasi Umum,



Jusdawati, S.Sos  
NIP. 19680317 199203 2 004

David Maruni  
NIP. 19750806 200604 1 006



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marhalim  
Jabatan : Pengadministrasi Umum  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jusdawati, S.Sos  
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Jusdawati, S.Sos  
NIP. 19680317 199203 2 004

Pihak Pertama,

Marhalim  
NIP. 19821030 201407 1 002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 unit	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		36 unit	

Kegiatan/Subkegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	105.120.000	
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	40.900.000	
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	21.910.000	
Jumlah	Rp.	167.930.000	

Dumai, September 2024

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian,

Pengadministrasi Umum,

  
 Jusdawati, S.Sos

NIP. 19680317 199203 2 004

  
 Marhalim

NIP. 19821030 201407 1 002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saputra Nova  
Jabatan : Pengadministrasi Umum  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Issinawari, S.Sos  
Jabatan : Analis Kebijakan  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Issinawari, S.Sos  
NIP. 19760605 200212 1 005

Pihak Pertama,

Saputra Nova  
NIP. 19861110 201001 1 011

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 laporan
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	29 keluarga

Analisis Kebijakan,



Issinawari, S.Sos  
NIP. 19760605 200212 1 00

Dumai, September 2024

Pengadministrasi Umum,



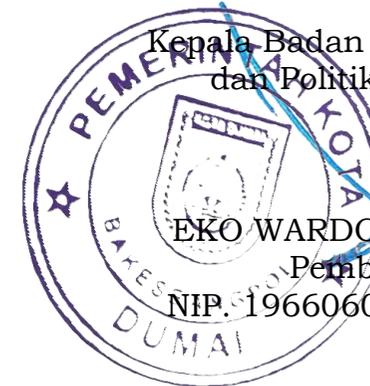
Saputra Nova  
NIP. 19861110 201001 1 011

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

Kinerja Utama	Indikator	Rumus Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan tahun ini}}{\text{Jumlah Kegiatan Peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri}} \times 100\%$	90%	94%	104%
	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang terfasilitasi tahun ini}}{\text{Jumlah Konflik tahun ini}} \times 100\%$	100%	85%	85%

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai,

EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660602 199003 1 005





KEBIJAKAN STRATEGIS		URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	SATUAN TARGET DAN REALISASI	CAPAIAN KINERJA FISIK (%)	TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	SATUAN CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN
		1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	51	orang	51.00	1,547,690,855	1,090,738,664	70.48	%		
		1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16	16	orang	100.00	50,000,000	36,299,000	72.60	%	Penundaan Pembayaran Belanja TA 2024	Pembayaran akan dilakukan pada TA 2025
		2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2	1	laporan	50.00	300,000,000	284,350,000	94.78	%	Penundaan Pembayaran Belanja TA 2024	Pembayaran akan dilakukan pada TA 2025
		3 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	120	29	keluarga	24.17	49,868,900	0	0.00	%	Penundaan Pembayaran Belanja TA 2024	Pembayaran akan dilakukan pada TA 2025
		4 Pembentukan Paskibraka	84	35	orang	41.67	1,147,821,955	770,089,664	67.09	%	Penundaan Pembayaran Belanja TA 2024	Pembayaran akan dilakukan pada TA 2025
		3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100	100	%	100	33,894,866,910	32,252,179,390	95.15	%	-	-
		Indikator Program: Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik										
		1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	68	68	orang	100.00	33,894,866,910	32,252,179,390	95.15	%		
		1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45	45	orang	100.00	2,517,816,720	1,555,990,200	61.80	%	Penundaan Pembayaran Belanja TA 2024	Pembayaran akan dilakukan pada TA 2025
		2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	23	23	orang	100.00	41,920,000	0	0.00	%	Kegiatan Sosialisasi Pemilu Pemuda ini tidak jadi dilaksanakan karena keterbatasan waktu	-
		3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2	2	laporan	100.00	31,335,130,190	30,696,189,190	97.96	%	Penundaan Pembayaran Belanja TA 2024	Pembayaran akan dilakukan pada TA 2025
		4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100	100	%	100	3,533,511,000	2,402,763,150	68.00	%	-	-
		Indikator Program: Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										
		1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	10	10	orang	100.00	3,533,511,000	2,402,763,150	68.00	%		
		1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5	5	orang	100.00	3,400,000,000	2,315,000,000	68.09	%	Hibah Uang untuk Ormas tidak semua bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran kas	
		2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5	5	orang	100.00	40,000,000	25,700,000	64.25	%	Penundaan Pembayaran Belanja TA 2024	Pembayaran akan dilakukan pada TA 2025

KEBIJAKAN STRATEGIS		URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET FISIK	REALISASI FISIK	SATUAN TARGET DAN REALISASI	CAPAIAN KINERJA FISIK (%)	TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	SATUAN CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN
		3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2	1	laporan	50.00	93,511,000	62,063,150	66.37	%	Penundaan Pembayaran Belanja TA 2024	Pembayaran akan dilakukan pada TA 2025
		<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>206,479,000</b>	<b>175,102,300</b>	<b>84.80</b>	<b>%</b>	-	-
			Indikator Program: Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya										
		1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	6	6	orang	100.00	206,479,000	175,102,300	84.80	%		
		2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6	6	orang	100.00	179,759,000	163,222,300	90.8	%		
		3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2	1	laporan	50.00	26,720,000	11,880,000	44.46	%	Kegiatan Sosialisasi P4GN belum bisa dilaksanakan karena ketersediaan anggaran kas yang terbatas	Akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2025
		<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1,313,034,200</b>	<b>932,628,254</b>	<b>71.03</b>	<b>%</b>	-	-
			Indikator Program: Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial										
		1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	116	116	orang	100.00	1,313,034,200	932,628,254	71.03	%		
		1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	48	48	orang	100.00	199,962,000	81,285,664	40.65	%	Penundaan Pembayaran Belanja TA 2024	Pembayaran akan dilakukan pada TA 2025
		2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	68	68	orang	100.00	184,872,000	150,824,500	81.58	%	Kesalahan Administrasi dalam pembuatan SK Walikota Dumai, sehingga terjadi keterlambatan dalam kegiatan Tim Wasdin	Telah dilakukan perbaikan, sehingga kegiatan tahun ini bisa berjalan dengan lancar
		3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3	2	laporan	66.67	130,213,200	21,440,000	16.47	%	Kegiatan tidak terlaksana karena keterbatasan waktu dan ketersediaan anggaran kas	Akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2025
		4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	3	1	dokumen	33.33	797,987,000	679,078,090	85.10	%		